DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori Ilyas, dkk, 2021, *Kontrak Publik,* Jakarta: Prenada Media Kencana.

Fajlurrahman Jurdi. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta; Rangkang Education.

Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta; Erlangga.

I Gde Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung.

Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Irwansyah, dan Ahsan yunus. 2020. *Metode Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel.* edisi Revisi. Yogyakarta; Mirra Buana media.

Ishaq. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta; Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta; Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*, ed. Ahmad Edi Subiyanto dan Rita Triana Budiarti. Jakarta: Konstitusi Press.

Nomensen Sinamo. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta; Jala Permata Aksara.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Cetakan ke-11. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.

Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Cetakan pertama. Yogyakarta; FH UII Press.

Rozali Abdullah. 2992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

ı Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum ministrasi Negara*, Surabaya, Fakultas Hukum, UNAIR

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta; PT. Kompas.

----------. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung; Sinar Baru.

SF Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta; Liberty.

----------. 2018. *Hukum Administrasi Negara I.* Cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta; FH UII Press.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta; UI Pres.

Sukarno Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia.* Makassar; Arus Timur.

Van der Pot dalam Ultrecht, Moh. Saleh Djinjang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VIII, Jakarta, Balai Buku Ichitiar

W. Riawan Tjandra. 2023. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta; Kencana.

W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita

Yusrizal. 2015. *Modul Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara*. Aceh; Unimal Pers.

Zairin Harahap. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Edisi Revisi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Muhammad Thabrani Mutalib. 2017. Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Di Indonesia. Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jurnal

Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan. 2017 “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanca Kota Manado”. Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, 2017. Universitas Sam Ratulangi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dian Utami Mas Bakar dan Audyna Mayasari Muin, 2018. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS", Vol. II, Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long.

Erlin Triartha Yuliani. 2020. “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya”. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5 Nomor 1. Universitas Bengkulu.

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaaerissa.2022. “Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses Pemulihan Legislative”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 11. Universitas Riau.

Victor Imanuel W. Nalle. Kedudukan Peraturan Kebijakandalam Undang-Undang Administrasipemerintahan. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 10, No. 1. Universitas Kristen Satya Wacana.

Wening Anggraita. 2021. “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)”. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7 Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Yodi Martono Wahyunadi. 2016, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Junal Hukum dan Peradilan,Vol. 5, Nomor 1. BLDK Mahakam Agung.

Y. Sri Pudyatmoko,“*Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 No. 4, Oktober 2007

Internet

Addi Fauzani. “Diskresi dan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja”, terdapat di https://kumparan.com/addi-fauzan/diskresi-dan-fiktif-positif-pasca-uu-cipta-kerja-1vENGLM3pY1/full (diakses pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 12.22 WITA).

https://www.kompasiana.com/saktilazuardi/beleidsregel-atau-peraturan-kebijakan-dalam-administrasinegara_550ed68c813311b82dbc63ff akses 18 Maret 2023, Pukul 22.45.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

https://www.kompasiana.com/saktilazuardi/beleidsregel-atau-peraturan-kebijakan-dalam-administrasinegara_550ed68c813311b82dbc63ff ,akses 28 September 2023. Pukul 10.50.

https://www.kompasiana.com/saktilazuardi/beleidsregel-atau-peraturan-kebijakan-dalam-administrasi-negara_550ed68c813311b82dbc63ff , akses 19 Maret 2023, pukul 23.27 Wita.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/107/ptun-jakarta- tolak-gugatan-terkait-seleksi-cha-nonkarier, diakses pada hari Kamis, 25 Mei 2023, pukul 19.34 Wita

Jimly Asshidqie dalam M Lutfi Chakim dikutip dari http://www.lutfichakim.com/2016/07/pseudowetgeving.html, pada hari Rabu, 24 Mei 2023, Pukul 15: 59 Wita

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 25.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Optimized using
trial version
www.balesio.com

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1517 TAHUN 2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh agar tidak turun dengan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, perlu kebijakan berdasarkan kewenangan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ter
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan.

KEDUA : Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA : Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEENAM : Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pedoman pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat berupa:

a. bantuan layanan transportasi;

b. penyediaan pangan dengan harga murah; dan

c. biaya personal Pendidikan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagi pekerja/buruh dengan kriteria memili
Penduduk daerah dengan besaran gaji paling l
(satu koma satu lima) kali Upah Minimum P
dibatasi oleh masa kerja.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua KADIN DKI Jakarta
8. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta